



# RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN Pemerintahan Daerah (RLPPD) TAHUN 2023



Dr. Drs. H. Maldi, S.H., M.M., M.Pd.  
Walikota Madiun

Inda Raya Ayu Miko Saputri SE, MIB  
Wakil Walikota Madiun



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)  
TAHUN 2023





## **KATA PENGANTAR**

***Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarokatuh***

Salam sejahtera bagi kita semua

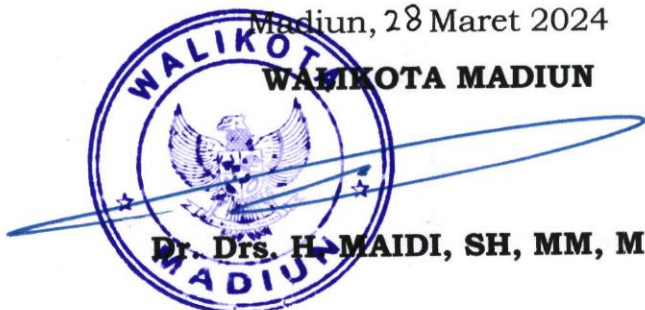
Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada akhirnya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Madiun Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disamping merupakan aktualisasi dari penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, juga merupakan media evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, penyelenggaraan urusan desentralisasi dan penyelenggaraan tugas pembantuan yang dilaksanakan Kota Madiun pada tahun 2023, dan selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan terselesaikannya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Madiun Tahun 2023 ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas sumbang saran dan pemikiran. Semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pembinaan lebih lanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala upaya kita dalam rangka **Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera.**

Sekian terima kasih.

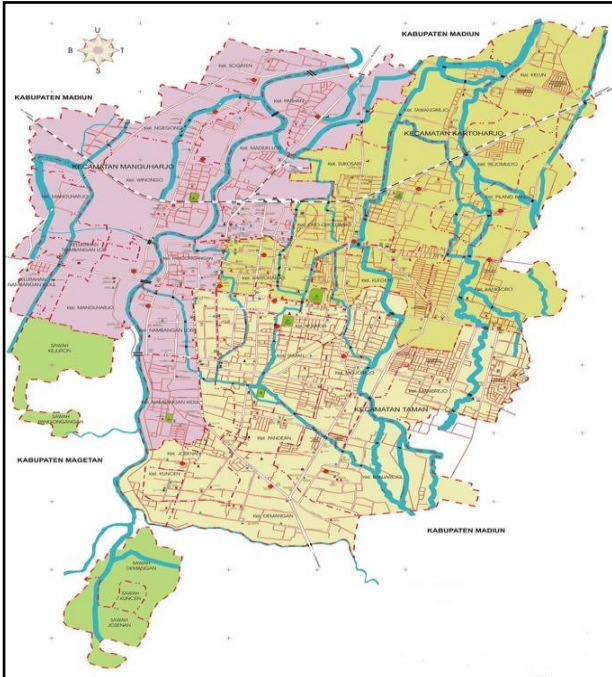
***Wassalamu' alaikum warahmatullahi wabarokatuh***

Madiun, 28 Maret 2024  
**WALIKOTA MADIUN**  
  
**Dr. Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

## A. DATA UMUM DAERAH

### KONDISI GEOGRAFIS

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Madiun dengan Kabupaten Madiun dan Batas Daerah Kota Madiun dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur,



disebutkan bahwa Kota Madiun terletak pada  $111^{\circ}$  BT –  $112^{\circ}$  BT dan  $7^{\circ}$  LS –  $8^{\circ}$  LS. Berdasarkan RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030, Kota Madiun memiliki wilayah seluas  $33,23 \text{ km}^2$  yang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kota Madiun adalah Kecamatan Taman dengan luasan sebesar  $12,46 \text{ km}^2$  (37,50%), disusul Kecamatan Kartoharjo seluas  $10,73 \text{ km}^2$  (32,29%), dan

Kecamatan Manguharjo seluas  $10,04 \text{ km}^2$  (30,21%).

Berikut ditampilkan jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di tiap kecamatan di Kota Madiun, yaitu :

- Kecamatan Manguharjo terdiri dari 325 RT dan 88 RW ;
- Kecamatan Taman terdiri dari 399 RT dan 107 RW ;
- Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 309 RT dan 74 RW.

### KONDISI DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk Kota Madiun tahun 2023 berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun adalah sebanyak 202.544 jiwa. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 99.319 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 103.225 jiwa. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga di Kota Madiun sebanyak 73.370 KK tersebar di tiga wilayah kecamatan.

## Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Manguharjo	29.624	30.735	<b>60.359</b>
2.	Taman	42.275	43.874	<b>86.149</b>
3.	Kartoharjo	27.420	28.616	<b>56.036</b>
<b>Jumlah</b>		<b>99.319</b>	<b>103.225</b>	<b>202.544</b>

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Madiun

## Jumlah Kepala Keluarga (KK) Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2023

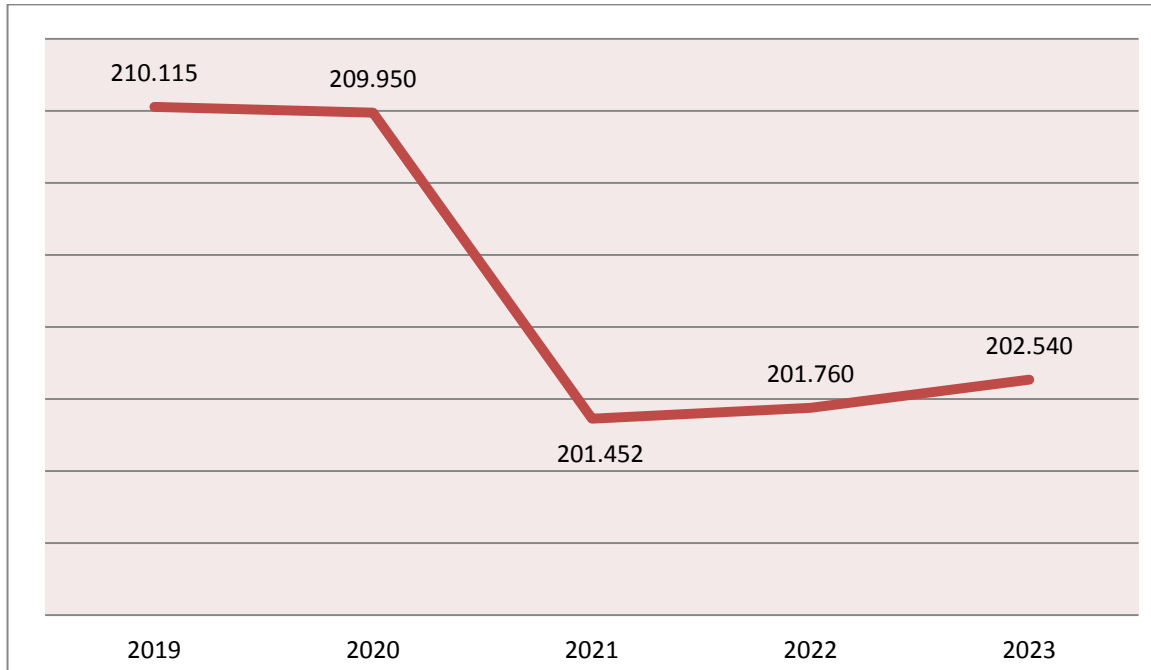
No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Manguharjo	16.280	6.247	<b>22.527</b>
2.	Taman	22.701	7.970	<b>30.671</b>
3.	Kartoharjo	14.934	5.238	<b>20.172</b>
<b>Jumlah</b>		<b>53.915</b>	<b>19.455</b>	<b>73.370</b>

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Madiun

## Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum/ Tidak Bekerja	<b>37.000</b>
2.	Mengurus Rumah Tangga	<b>32.656</b>
3.	Pelajar/ Mahasiswa	<b>40.083</b>
4.	Pensiunan	<b>5.819</b>
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<b>5.945</b>
6.	TNI - POLRI	<b>2.594</b>
7.	Karyawan BUMN	<b>1.540</b>
8.	Karyawan BUMD	<b>188</b>
9.	Karyawan Swasta	<b>45.505</b>
10.	Buruh/ Tukang	<b>4.852</b>
11.	KDH, WKDH, DPR, DPRD	<b>12</b>
12.	Guru/ Dosen	<b>2.220</b>
13.	Agamawan	<b>58</b>
14.	Kesehatan	<b>772</b>
15.	Pedagang	<b>2.071</b>
16.	Pekerjaan Lainnya	<b>21.239</b>
17.	Pekerjaan Lainnya	<b>37.000</b>
<b>Jumlah</b>		<b>202.540</b>

## Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019 s.d 2023



Sumber : Dinas Dukcapil Kota Madiun

**APARATUR SIPIL NEGARA**

Jumlah ASN Kota Madiun per 31 Desember 2023

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1.</b>	Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II)	25
<b>2.</b>	Jabatan Administrator (Eselon III)	100
<b>3.</b>	Jabatan Pengawas (Eselon IV)	218
<b>4.</b>	Jabatan Fungsional	2.370
<b>5.</b>	Jabatan Pelaksana	614
<b>Jumlah</b>		<b>3.327</b>

Sumber : BKPSDM Kota Madiun

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Tahun 2023

No	Uraian	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Tahun 2023
<b>I</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>1.088.817.109.508,00</b>	<b>1.117.609.570.233,47</b>	<b>102,64%</b>
1	Pendapatan Asli Daerah	261.815.342.908,00	255.560.530.258,67	97,61%
	1) Pajak Daerah	104.240.450.000,00	113.514.116.369,67	108,90%
	2) Retribusi Daerah	18.446.515.665,00	22.551.072.553,00	
	3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	16.160.694.027,00	14.983.008.032,73	92,71%
	4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	122.967.683.216,00	104.512.333.303,27	84,99%
2	Pendapatan Transfer	827.001.766.600,00	862.049.039.974,80	104,24%
	1) Pendapatan Transfer Pusat	730.719.376.000,00	740.776.955.162,80	101,38%
	2) Pendapatan Transfer Antar Daerah	96.282.390.600,00	121.272.084.812,00	125,95%
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	-	-	-
	1) Pendapatan Hibah	-	-	-
	2) Dana Darurat	-	-	-
	3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan	-	-	-
	Hibah Dana BOS	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi/ Pemda Lainnya	-	-	-

Sumber : BKAD Kota Madiun

## PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

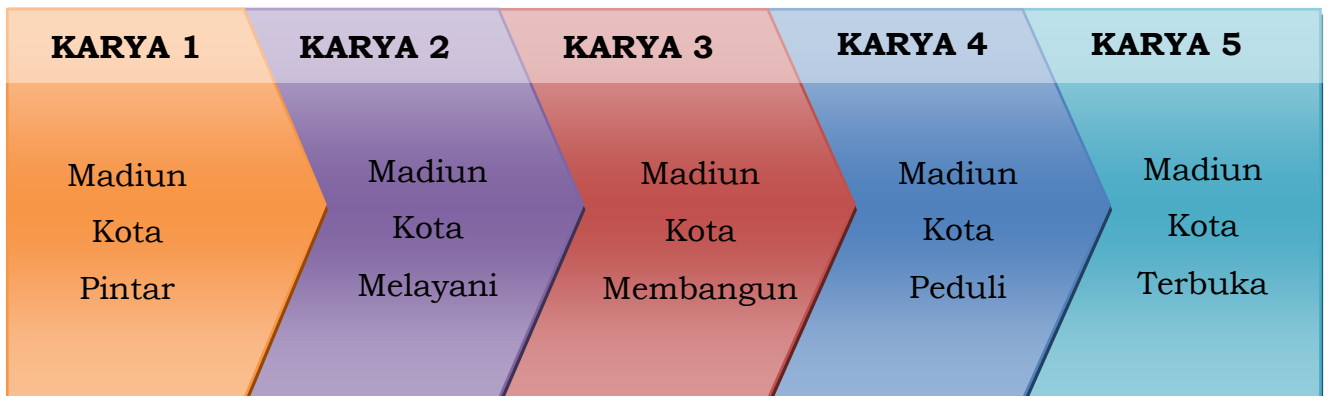
### VISI

**Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa  
Menuju Masyarakat Sejahtera**

### MISI

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Untuk melaksanakan dan mengimplementasikan Misi Pembangunan Kota Madiun Tahun 2019-2024 diwujudkan dalam **Panca Karya** sebagai berikut :



Tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Pembangunan Ekonomi Inklusif Menuju Masyarakat Sejahtera”**

### PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2022

1. Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital
2. Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia
3. Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi
4. Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan



## B. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian Kinerja Makro yang diperoleh oleh Kota Madiun Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Laju Kinerja
1.	Indeks Pembangunan Manusia	83,02	83,71	0,831%
2.	Angka Kemiskinan	4,76	4,74	-0,42%
3.	Angka Pengangguran	6,39	5,85	-8,451%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,52	5,9	5,072
5.	Pendapatan per Kapita	79.817.000	86.285.000	8,104 %
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,398	0,461	4,523%

Sumber: Berita Resmi Statistik 2023, BPS Kota Madiun

## C. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

### 1. URUSAN PENDIDIKAN

#### a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kota Madiun pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100%	100%
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	100%
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100%	100%
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%

#### b. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan



Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Kota Madiun Tahun 2023 sebesar Rp 287.340.566.271 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>184.684.189.527</b>	<b>172.195.902.385</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.323.636.600	8.147.534.040
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	171.254.487.000	159.638.891.999
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.115.934.834	3.540.257.844
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98.475.293	94.517.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	891.655.800	774.701.502
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>72.052.934.535</b>	<b>69.054.181.960</b>
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	53.186.954.935	51.717.822.458
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	8.529.559.562	7.569.731.721
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.344.990.038	8.906.659.721
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	991.430.000	859.968.059
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>4.807.339.116</b>	<b>4.282.839.413</b>
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	3.550.447.213	3.196.020.898
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.256.891.903	1.086.818.515
	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>1.609.200.000</b>	<b>1.591.415.200</b>
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1.609.200.000	1.591.415.200
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>571.071.000</b>	<b>567.177.915</b>
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>571.071.000</b>	<b>567.177.915</b>
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	571.071.000	567.177.915
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	-	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	-	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>412.803.000</b>	<b>386.530.356</b>
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>412.803.000</b>	<b>386.530.356</b>

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	412.803.000	386.530.356
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	628.786.000	605.291.051
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	628.786.000	605.291.051
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	628.786.000	605.291.051
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	314.656.000	283.734.083
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	314.656.000	283.734.083
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	314.656.000	283.734.083
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	633.673.000	595.224.756
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	633.673.000	595.224.756
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	633.673.000	595.224.756
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	254.326.000	226.813.312
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	254.326.000	226.813.312
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	254.326.000	226.813.312
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	564.898.000	556.776.917
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	564.898.000	556.776.917
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	564.898.000	556.776.917
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	382.222.000	379.722.423
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	382.222.000	379.722.423
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	382.222.000	379.722.423
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	227.742.000	220.004.365
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	227.742.000	220.004.365

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	227.742.000	220.004.365
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	433.412.000	408.188.211
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	433.412.000	408.188.211
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	433.412.000	408.188.211
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	381.431.000	346.328.576
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	381.431.000	346.328.576
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	381.431.000	346.328.576
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	189.945.500	184.824.193
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	189.945.500	184.824.193
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	189.945.500	184.824.193
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	566.775.800	554.199.774
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	566.775.800	554.199.774
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	566.775.800	554.199.774
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	319.685.500	310.024.960
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	319.685.500	310.024.960
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	319.685.500	310.024.960
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	210.070.000	177.956.938
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	210.070.000	177.956.938
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	210.070.000	177.956.938
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	368.189.000	350.397.523
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	368.189.000	350.397.523
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	368.189.000	350.397.523
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	531.806.000	528.503.906
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	531.806.000	528.503.906



No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	531.806.000	528.503.906
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	566.720.000	555.532.212
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	566.720.000	555.532.212
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	566.720.000	555.532.212
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	329.098.000	326.038.501
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	329.098.000	326.038.501
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	329.098.000	326.038.501
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	265.352.000	254.839.519
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	265.352.000	254.839.519
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	265.352.000	254.839.519
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	209.199.000	202.949.371
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	209.199.000	202.949.371
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	209.199.000	202.949.371
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	939.782.000	870.103.794
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	939.782.000	870.103.794
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	939.782.000	870.103.794
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	541.511.000	528.938.475
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	541.511.000	528.938.475
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	541.511.000	528.938.475
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	805.904.000	796.021.660
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	805.904.000	796.021.660
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	805.904.000	796.021.660
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	523.406.000	453.622.711

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>523.406.000</b>	<b>453.622.711</b>
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>523.406.000</b>	<b>453.622.711</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	-	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	-	
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	-	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>549.812.000</b>	<b>532.323.150</b>
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>549.812.000</b>	<b>532.323.150</b>
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>549.812.000</b>	<b>532.323.150</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>287.132.000</b>	<b>282.354.134</b>
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>287.132.000</b>	<b>282.354.134</b>
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>287.132.000</b>	<b>282.354.134</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>585.014.000</b>	<b>579.640.498</b>
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>585.014.000</b>	<b>579.640.498</b>
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>585.014.000</b>	<b>579.640.498</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>231.790.000</b>	<b>166.161.422</b>
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>231.790.000</b>	<b>166.161.422</b>
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>231.790.000</b>	<b>166.161.422</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>329.296.000</b>	<b>324.284.879</b>
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>329.296.000</b>	<b>324.284.879</b>
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>329.296.000</b>	<b>324.284.879</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>489.066.000</b>	<b>485.296.007</b>
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>489.066.000</b>	<b>485.296.007</b>
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>489.066.000</b>	<b>485.296.007</b>

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	743.156.000	712.754.130
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	743.156.000	712.754.130
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	743.156.000	712.754.130
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	358.755.000	357.078.926
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	358.755.000	357.078.926
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	358.755.000	357.078.926
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	882.671.000	879.660.547
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	882.671.000	879.660.547
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	882.671.000	879.660.547
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	208.680.000	205.921.896
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	208.680.000	205.921.896
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	208.680.000	205.921.896
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	286.769.000	276.238.765
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	286.769.000	276.238.765
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	286.769.000	276.238.765
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	641.556.000	605.006.261
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	641.556.000	605.006.261
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	641.556.000	605.006.261
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	666.100.000	657.800.810
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	666.100.000	657.800.810
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	666.100.000	657.800.810



No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	655.729.000	636.802.614
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	655.729.000	636.802.614
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	655.729.000	636.802.614
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	320.075.000	316.434.570
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	320.075.000	316.434.570
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	320.075.000	316.434.570
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	889.288.000	883.387.658
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	889.288.000	883.387.658
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	889.288.000	883.387.658
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	600.786.600	590.297.694
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	600.786.600	590.297.694
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	600.786.600	590.297.694
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	543.888.000	507.528.634
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	543.888.000	507.528.634
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	543.888.000	507.528.634
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	323.487.000	314.081.804
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	323.487.000	314.081.804
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	323.487.000	314.081.804
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	405.605.000	381.174.249
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	405.605.000	381.174.249
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	405.605.000	381.174.249
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	299.533.000	270.101.922
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	299.533.000	270.101.922
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	299.533.000	270.101.922

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Dasar		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	325.252.000	317.501.236
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	325.252.000	317.501.236
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	325.252.000	317.501.236
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	350.490.000	325.309.061
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.490.000	325.309.061
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	350.490.000	325.309.061
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	386.351.000	359.935.814
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	386.351.000	359.935.814
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	386.351.000	359.935.814
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	187.519.000	162.613.920
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	187.519.000	162.613.920
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	187.519.000	162.613.920
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	184.354.000	180.805.868
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	184.354.000	180.805.868
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	184.354.000	180.805.868
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	247.799.000	216.605.773
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	247.799.000	216.605.773
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	247.799.000	216.605.773
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.956.624.000	1.890.397.491
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.956.624.000	1.890.397.491
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.956.624.000	1.890.397.491
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.552.403.000	1.511.635.155

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.552.403.000</b>	<b>1.511.635.155</b>
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.552.403.000	1.511.635.155
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>1.244.469.000</b>	<b>1.229.328.263</b>
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.244.469.000</b>	<b>1.229.328.263</b>
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.244.469.000	1.229.328.263
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>1.596.102.000</b>	<b>1.482.894.464</b>
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.596.102.000</b>	<b>1.482.894.464</b>
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.596.102.000	1.482.894.464
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>1.290.903.000</b>	<b>1.265.644.886</b>
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.290.903.000</b>	<b>1.265.644.886</b>
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.290.903.000	1.265.644.886
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>1.453.966.500</b>	<b>1.369.015.231</b>
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.453.966.500</b>	<b>1.369.015.231</b>
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.453.966.500	1.369.015.231
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>1.521.650.000</b>	<b>1.469.315.340</b>
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.521.650.000</b>	<b>1.469.315.340</b>
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.521.650.000	1.469.315.340
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>1.001.882.000</b>	<b>901.502.089</b>
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.001.882.000</b>	<b>901.502.089</b>
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.001.882.000	901.502.089
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>1.326.054.000</b>	<b>1.184.862.901</b>
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.326.054.000</b>	<b>1.184.862.901</b>
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.326.054.000	1.184.862.901



No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.438.900.000	1.388.997.474
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.438.900.000	1.388.997.474
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.438.900.000	1.388.997.474
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.441.708.000	1.423.081.744
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.441.708.000	1.423.081.744
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.441.708.000	1.423.081.744
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.032.771.000	1.008.488.382
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.032.771.000	1.008.488.382
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.032.771.000	1.008.488.382
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.259.262.000	1.229.702.717
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.259.262.000	1.229.702.717
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.259.262.000	1.229.702.717
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	685.237.000	664.513.432
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	685.237.000	664.513.432
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	685.237.000	664.513.432
	<b>JUMLAH</b>	<b>305.108.012.078</b>	<b>287.340.566.271</b>

### c. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kota Madiun Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Masalah
1.	Daftar anak usia 7-15 tahun yang tidak berpartisipasi di satuan SD/SMP di Kota Madiun
2.	Adanya Persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit
3.	Daftar anak usia 7-18 tahun yang belum bersekolah formal dan belum berpartisipasi di satuan pendidikan kesetaraan

4.	Data Anak Tidak Sekolah (ATS) belum terintegrasi dengan dapodik sehingga terdapat Anak Tidak Sekolah yang belum terdata
----	---

## 2. URUSAN KESEHATAN

- a. Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kota Madiun pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	4,916%	5,811%
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%
8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	56,226%	62,025%
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%

- b. Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Kota Madiun Tahun 2023 sebesar Rp 257.236.854.825 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>49.664.539.760</b>	<b>48.199.528.363</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>330.406.000</b>	<b>297.984.700</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	172.825.700	159.746.400
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	124.754.400	124.754.400
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.825.900	13.483.900
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>46.266.894.960</b>	<b>45.059.692.551</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.266.894.960	45.059.692.551
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.598.242.800</b>	<b>2.469.736.037</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.847.022.800	1.719.767.385
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	751.220.000	749.968.652
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>468.996.000</b>	<b>372.115.075</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	321.706.000	227.473.629
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.663.000	23.618.446
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	122.627.000	121.023.000
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>47.730.442.519</b>	<b>45.358.359.289</b>
	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.412.841.595</b>	<b>5.964.349.413</b>
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	246.629.080	238.461.800
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	2.347.087.985	2.090.542.439
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	158.439.200	130.140.200
	Pengadaan Obat, Vaksin	2.904.515.327	2.871.057.196
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	651.790.003	546.421.698
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	104.380.000	87.726.080
	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>41.317.600.924</b>	<b>39.394.009.876</b>
	<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>	<b>883.311.400</b>	<b>877.702.400</b>
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	49.007.200	46.907.200
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	84.232.800	71.378.800
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	242.621.000	235.939.910
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	97.973.500	89.808.892
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	56.621.200	52.281.200
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	50.753.600	41.397.600
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13.548.000	12.148.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	202.012.000	192.333.200

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	64.735.000	62.699.200
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	53.440.000	50.292.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	199.463.200	191.878.200
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.488.729.800	1.456.931.650
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	207.449.500	187.386.500
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	115.042.400	97.728.700
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	112.452.800	95.852.800
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	36.348.000	34.730.200
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	55.294.000	52.863.200
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	475.514.250	374.797.800
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	33.448.581.200	31.981.761.480
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	324.109.600	199.567.500
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.152.376.574	2.121.744.844
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	220.947.900	191.905.400
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	683.036.000	673.973.200
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>893.645.000</b>	<b>749.215.874</b>
	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>42.419.000</b>	<b>42.419.000</b>
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	42.419.000	42.419.000
	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>851.226.000</b>	<b>706.796.874</b>
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	851.226.000	706.796.874
	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>91.395.000</b>	<b>86.676.500</b>
	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>58.600.000</b>	<b>55.550.500</b>
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	58.600.000	55.550.500
	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>32.795.000</b>	<b>31.126.000</b>
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	32.795.000	31.126.000
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>2.853.562.536</b>	<b>2.792.104.466</b>
	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>504.002.736</b>	<b>474.358.481</b>
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	504.002.736	474.358.481

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.349.559.800</b>	<b>2.317.745.985</b>
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.349.559.800	2.317.745.985
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>142.896.676.875</b>	<b>138.506.886.074</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>107.434.707.164</b>	<b>104.041.227.058</b>
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>29.935.117.601</b>	<b>26.677.233.826</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.935.117.601	26.677.233.826
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>770.550.000</b>	<b>713.450.000</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	770.550.000	713.450.000
	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>76.729.039.563</b>	<b>76.650.543.232</b>
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	76.729.039.563	76.650.543.232
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>35.461.969.711</b>	<b>34.465.659.016</b>
	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>35.461.969.711</b>	<b>34.465.659.016</b>
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	546.652.000	537.537.000
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	22.862.791.500	22.862.791.476
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.511.199.984	2.076.815.550
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.828.686.000	3.289.952.000
	Pengadaan Obat, Vaksin	5.712.640.227	5.698.562.990
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>3.012.933.500</b>	<b>2.775.813.688</b>
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>2.997.423.500</b>	<b>2.760.804.088</b>
	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>27.642.000</b>	<b>3.024.000</b>
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	27.642.000	3.024.000
	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.969.781.500</b>	<b>2.757.780.088</b>
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.032.000	25.932.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3.750.000	3.650.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.300.000	6.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2.592.000	2.392.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.000.000	3.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.300.000	1.250.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.841.200	3.341.180
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	583.664.600	553.989.350
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	27.962.000	27.916.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.583.800	3.949.000



No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	128.433.600	128.433.600
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.814.000	7.014.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.000.000	1.000.000
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	54.438.800	50.794.800
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	416.000	416.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.108.353.500	1.937.702.158
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	200.000	-
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.000.000	1.000.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	100.000	-
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>15.510.000</b>	<b>15.009.600</b>
	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>15.510.000</b>	<b>15.009.600</b>
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	15.510.000	15.009.600
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>2.587.003.100</b>	<b>2.524.441.680</b>
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>2.544.769.100</b>	<b>2.482.207.680</b>
	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>27.470.000</b>	<b>4.548.000</b>
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	27.470.000	4.548.000
	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.517.299.100</b>	<b>2.477.659.680</b>
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	30.425.200	30.378.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	4.900.000	4.650.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.400.000	9.400.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3.864.000	3.864.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.000.000	1.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.750.000	1.750.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	614.653.800	606.256.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15.140.000	15.140.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.524.000	12.524.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	127.180.600	127.174.800
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.650.000	2.350.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100.000	100.000
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	28.708.000	28.108.000
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	166.400	83.200
	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.663.487.100	1.633.781.680
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan	250.000	100.000

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Pemberian Obat Massal)		
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.000.000	1.000.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	100.000	-
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>42.234.000</b>	<b>42.234.000</b>
	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>42.234.000</b>	<b>42.234.000</b>
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	42.234.000	42.234.000
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>2.936.166.500</b>	<b>2.733.860.813</b>
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>2.821.754.500</b>	<b>2.623.316.413</b>
	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>29.368.000</b>	<b>3.060.000</b>
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	29.368.000	3.060.000
	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.792.386.500</b>	<b>2.620.256.413</b>
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	22.668.000	22.668.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.584.000	9.984.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	6.158.000	6.008.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.000.000	1.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.100.000	1.100.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	739.242.200	653.205.600
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	600.000	600.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17.923.400	14.897.500
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	102.376.400	102.364.000
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.200.000	6.800.000
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	34.952.000	34.452.000
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	416.000	332.800
	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.844.816.500	1.765.694.513
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	250.000	250.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.000.000	900.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	100.000	-
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>114.412.000</b>	<b>110.544.400</b>
	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>114.412.000</b>	<b>110.544.400</b>
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	114.412.000	110.544.400

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>2.642.669.500</b>	<b>2.548.003.261</b>
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>2.569.417.500</b>	<b>2.477.301.261</b>
	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>30.407.000</b>	<b>5.676.000</b>
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30.407.000	5.676.000
	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.539.010.500</b>	<b>2.471.625.261</b>
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	21.790.400	21.790.400
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	5.700.000	5.700.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3.200.000	3.200.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.440.000	7.440.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.000.000	1.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.350.000	1.250.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	500.000	500.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	570.850.600	564.923.550
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7.249.600	7.248.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21.519.000	20.640.500
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	101.388.000	101.388.000
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.453.600	5.753.600
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	2.400.000	2.400.000
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	41.752.800	41.152.800
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	416.000	166.400
	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.744.300.500	1.686.472.011
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	200.000	200.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	400.000	400.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	100.000	-
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>73.252.000</b>	<b>70.702.000</b>
	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>73.252.000</b>	<b>70.702.000</b>
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	73.252.000	70.702.000
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>3.659.477.000</b>	<b>3.539.316.528</b>
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>3.596.287.100</b>	<b>3.477.590.528</b>
	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>31.286.000</b>	<b>7.020.000</b>
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	31.286.000	7.020.000

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Pelayanan Kesehatan		
	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.565.001.100</b>	<b>3.470.570.528</b>
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	38.950.800	38.950.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.200.000	6.200.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	4.650.000	4.650.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.000.000	1.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.500.000	1.500.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.250.000	1.500.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.028.370.800	1.027.843.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	32.966.000	32.966.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.793.900	9.560.600
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	66.538.400	60.778.400
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.200.000	1.650.000
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	46.970.000	45.820.000
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	499.200	332.800
	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.320.312.000	2.236.369.728
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.200.000	1.200.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	500.000	250.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	100.000	-
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>63.189.900</b>	<b>61.726.000</b>
	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>63.189.900</b>	<b>61.726.000</b>
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	63.189.900	61.726.000
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>3.269.335.000</b>	<b>3.085.304.566</b>
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>3.234.501.000</b>	<b>3.052.270.566</b>
	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>28.827.000</b>	<b>5.340.000</b>
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	28.827.000	5.340.000
	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.205.674.000</b>	<b>3.046.930.566</b>
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24.370.800	24.306.400
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	11.350.000	11.350.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.600.000	6.600.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.332.000	5.332.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.500.000	1.500.000

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.000.000	3.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	11.000.000	11.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	849.704.400	849.087.100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	39.135.300	39.110.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.063.300	7.788.100
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	85.471.200	85.471.200
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.200.000	3.800.000
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	35.464.000	34.764.000
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	416.000	259.500
	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.113.717.000	1.962.712.266
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	500.000	500.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	750.000	350.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	100.000	-
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>34.834.000</b>	<b>33.034.000</b>
	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>34.834.000</b>	<b>33.034.000</b>
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	34.834.000	33.034.000
		<b>267.405.138.390</b>	<b>257.236.854.825</b>

- c. Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Kota Madiun Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Penetapan sasaran SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi mengikuti hasil Riskesdas 2018, dengan prevalensi penderita hipertensi di Kota Madiun digambarkan sebesar 47,7% dari penduduk usia >15th. Capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi tidak mencapai sasaran, dikarenakan pada kondisi sebenarnya yang diperoleh dari hasil pelayanan kesehatan dalam gedung di fasilitas kesehatan dan luar gedung seperti Posbindu PTM, berbagai acara seperti pertemuan PKK, Posyandu lansia, Posyandu balita, Arisan RT dan Skrining di OPD Seluruh Kota Madiun maupun skrining kesehatan di Lapas, jumlah penderita Hipertensi di Kota Madiun tidak sebanyak itu.



### 3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- a. Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh oleh Kota Madiun pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	100%	100%
2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	100%	0 (TDI)
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%	0
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	98,170%	100%
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	95,259%	99,8701327%
6.	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	100%	100 %
7.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	99,088%	98,277449%
8.	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	95%	104%
9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%

- b. Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Madiun Tahun 2023 sebesar Rp 127.717.124.540 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12.182.802.674</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>50.000.000</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	49.881.943
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.317.344.030</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.317.344.030	6.373.362.679
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>352.876.284</b>	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	352.876.284	348.365.012
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>15.575.000</b>	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.575.000	14.575.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.362.934.022</b>	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.362.934.022	3.184.341.635
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.084.073.338</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	370.280.838	363.721.862
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	713.792.500	703.214.989
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>7.157.271.500</b>	
	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.157.271.500</b>	
	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	235.100.000	229.177.830
	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	2.123.400.000	2.116.853.250
	Normalisasi/Restorasi Sungai	3.927.242.500	3.796.187.516
	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	871.529.000	868.269.520
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>21.269.000</b>	
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>21.269.000</b>	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	21.269.000	20.095.000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>16.872.319.750</b>	
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>16.872.319.750</b>	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	934.450.000	762.260.900
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	13.295.841.000	13.099.927.926
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	2.642.028.750	2.505.771.647
	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>46.838.268.400</b>	
	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>46.838.268.400</b>	
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	242.900.000	224.678.300
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	46.595.368.400	45.495.512.355
	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>12.877.487.200</b>	
	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>12.877.487.200</b>	

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	12.197.807.500	11.646.863.204
	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	679.679.700	671.410.014
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>34.139.050.650</b>	
	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>34.139.050.650</b>	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	341.114.450	273.434.450
	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	316.258.000	273.524.875
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	408.600.000	403.465.065
	Pembangunan Jalan	1.726.277.000	1.712.959.073
	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	12.366.408.000	12.147.625.760
	Pemeliharaan Berkala Jalan	13.419.746.000	13.380.375.119
	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.059.337.200	3.945.855.288
	Pembangunan Jembatan	1.063.670.000	1.053.070.433
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	437.640.000	432.610.483
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>986.419.000</b>	
	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>207.669.000</b>	
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	207.669.000	166.952.886
	<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>	<b>778.750.000</b>	
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	778.750.000	532.799.106
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>1.075.860.000</b>	
	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>732.000.000</b>	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	177.000.000	161.869.096
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	555.000.000	483.836.482
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	-	-
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	-	-
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>140.000.000</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	140.000.000	126.149.107
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>203.860.000</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	203.860.000	148.126.735
		<b>132.150.748.174</b>	<b>127.717.124.540</b>

- c. Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Madiun Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Masalah
1.	<p>Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tupoksi menjalankan kegiatan untuk mengurangi potensi banjir/ genangan wilayah kota. Wilayah Kota Madiun dilintasi oleh sungai-sungai yang mana menjadi kewenangannya merupakan kewenangan Dinas Pengairan Propinsi Jawa Timur dan BBWS Bengawan Solo.</p> <p>Pemeliharaan dan pembangunan saluran yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Pengairan Propinsi Jawa Timur dan BBWS Bengawan Solo dikarenakan keterbatasan anggaran dan luasan wilayah maka pemeliharaan dan pembangunan saluran dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Madiun dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.</p> <p>Untuk pemeliharaan dan pembangunan saluran ordo 2 perencanaan dan pelaksanaan teknis harus mendapatkan rekomendasi teknis ke BBWS Bengawan Solo. Sementara untuk pemeliharaan dan pembangunan saluran ordo 3 dan 4, perencanaan dan pelaksanaan teknis dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota</p>
2.	<p>Bidang Cipta Karya untuk Sie Penataan Bangunan Gedung apabila tolok ukur kinerja berdasarkan jumlah Bangunan Gedung milik Pemerintah Kota Madiun, maka permasalahan yang dialami adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Cipta Karya belum memiliki data total jumlah bangunan gedung milik Pemerintah Kota Madiun;</li> <li>2. Bidang Cipta Karya tidak hanya mengerjakan pembangunan/rehab bangunan milik Pemerintah Kota Madiun saja, akan tetapi juga melaksanakan pembangunan/rehab bangunan milik instansi vertikal yang nantinya akan diserahkan melalui mekanisme hibah. Apakah ketika ini dilakukan, maka tidak dianggap sebagai suatu capaian kinerja, mengingat aset yang dibangun/direhab bukan aset milik Pemerintah Kota Madiun.</li> </ol> <p>Pembangunan/rehab bangunan milik Pemerintah Kota Madiun bukan hanya dilakukan oleh Dinas PUPR saja, akan tetapi juga kewenangan masing-masing OPD yang memiliki aset bangunan gedung. Sehingga untuk bangunan gedung yang bukan merupakan kewenangan Dinas PUPR akan kesulitan melakukan pemantauan/pendataan peningkatan kondisi bangunan gedungnya mengingat tenaga teknis yang terbatas.</p>

	<p>Bidang Cipta Karya untuk Sie Pengembangan Jasa Konstruksi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan Jasa Konstruksi yang ada di Kota Madiun mengalami kondisi yang dinamis sehingga perlu adanya pembinaan dan pengawasan agar keberadaannya tetap memberikan sumbangsih terhadap pembangunan yang ada di Kota Madiun. Pembinaan dan Pengawasan yang telah dilakukan setiap tahun oleh Pemerintah Kota Madiun dalam hal ini melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun sudah maksimal namun perlu ditingkatkan lagi terutama dalam hal penyampaian regulasi terbaru terkait perkembangan Jasa Konstruksi pada skala nasional.</li> <li>2. Adanya perubahan regulasi bentuk perpanjangan Ijin BUJK terkait PJT/ penanggung jawab teknis pada BUJK, awalnya bisa untuk BUJK type sederhana bisa menggunakan PJT jenjang 5 menjadi PJT jenjang 6, sedangkan BUJK level sederhana masih minim mempunyai PJT bersertifikat SKK jenjang 6</li> </ol> <p>Bidang Cipta Karya untuk Sie Penataan Bangunan dan Lingkungan apabila tolok ukur kinerja berdasarkan jumlah Saluran Lingkungan di wilayah Kota Madiun, maka permasalahan yang dialami adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya database saluran lingkungan di wilayah Kota Madiun sehingga parameter pelaksanaan kegiatan belum ada;</li> <li>2. Pelaksanaan manajemen pengolahan limbah domestic yang masih tumpang tindih dengan OPD lain sehingga penentuan sasaran menjadi kendala.</li> <li>3. Penyediaan kebutuhan air minum sudah mencakup seluruh wilayah Kota Madiun dan kegiatan fisik sudah diserahkan pada PDAM sehingga tidak banyak kegiatan.</li> <li>4. Untuk penyusunan pelaporan SPM masih simpang siur dalam penggunaan data karena pelaksana SPM adalah dari PDAM dan Dinas Perkim sedangkan Dinkes juga mengeluarkan data terkait dat rumah sehat.</li> </ol>
3.	<p>Bidang Tata Kota untuk Sie Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya tim pengendalian untuk Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PMP UMK) yang telah terbit, sedangkan pernyataan mandiri yang telah terbit sudah mencapai lebih dari 1000 pernyataan mandiri.</li> </ol>
4.	<p>Bidang Tata Kota untuk Sie Perencanaan Tata Ruang,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses bisnis penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Kota Madiun yang dinamis dan rinci</li> <li>2. Banyaknya permohonan perijinan terkait pemanfaatan ruang yang memerlukan koordinasi dengan stakholder terkait</li> </ol>



#### 4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- a. Capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diperoleh oleh Kota Madiun pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	0
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100%	0
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	98,588%	100%
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,423%	0,2813792%
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	100%

- b. Realisasi belanja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Madiun Tahun 2023 sebesar Rp 40.611.823.081 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.285.243.705</b>	<b>9.364.651.236</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>18.673.400</b>	<b>18.658.630</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.673.400	18.658.630
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.648.468.285</b>	<b>4.825.205.364</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.610.968.670	4.787.941.364
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	37.499.615	37.264.000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>139.600.000</b>	<b>139.337.031</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	129.600.000	129.363.525
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	9.973.506
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>233.880.000</b>	<b>233.459.123</b>
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233.880.000	233.459.123
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>223.610.017</b>	<b>219.391.500</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	223.610.017	219.391.500

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.094.091.613</b>	<b>2.004.308.278</b>
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.094.091.613	2.004.308.278
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.926.920.390</b>	<b>1.924.291.310</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.434.008.090	1.433.669.140
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	149.676.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	342.912.300	340.946.170
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>2.477.810.500</b>	<b>2.384.725.563</b>
	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>86.150.000</b>	<b>85.145.200</b>
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	86.150.000	85.145.200
	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>2.295.210.500</b>	<b>2.203.833.913</b>
	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.295.210.500	2.203.833.913
	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>96.450.000</b>	<b>95.746.450</b>
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	96.450.000	95.746.450
	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>6.051.801.600</b>	<b>5.955.079.435</b>
	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>95.000.000</b>	<b>94.916.700</b>
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	95.000.000	94.916.700
	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>5.956.801.600</b>	<b>5.860.162.735</b>
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	236.996.000	206.548.200
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.372.940.600	2.371.789.270
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	3.346.865.000	3.281.825.265
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>23.392.447.900</b>	<b>22.907.366.847</b>
	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>23.392.447.900</b>	<b>22.907.366.847</b>
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	23.392.447.900	22.907.366.847
		<b>42.207.303.705</b>	<b>40.611.823.081</b>

c. Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Madiun Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk permasalahan yang dihadapi oleh Kota Madiun terkait korban yang terkena bencana adalah warga atau korban relokasi tidak bersedia pindah dikarenakan lokasi rumah susun yang disediakan untuk korban bencana lokasinya terlalu jauh dengan mereka tinggal,

- dan ada anaknya yang masih sekolah dan tempat sekolahnya terlalu jauh dengan lokasi rumah susun yang disediakan oleh Pemerintah ;
- 2) Untuk penyediaan rumah layak huni terkendala terkait ketersediaan lahan yang semakin menipis khususnya di kawasan perkotaan.

## 5. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- a. Capaian kinerja urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh oleh Kota Madiun pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	26,289181%
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%
7.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	7,95	11%

- b. Realisasi belanja Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Madiun Tahun 2023 sebesar Rp 25.217.264.728 dengan rincian program/kegiatan unggulan setiap Perangkat Daerah sebagai berikut:
- 1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>13.354.062.494,000</b>	<b>11.365.422.212,000</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>163.974.000,000</b>	<b>163.078.400,000</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	163.974.000,000	163.078.400,000
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.858.848.000,000</b>	<b>6.236.414.742,000</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.858.848.000,000	6.236.414.742,000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>684.175.000,000</b>	<b>617.631.300,000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	684.175.000,000	617.631.300,000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>300.000.000,000</b>	<b>299.892.579,000</b>
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,000	299.892.579,000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>750.841.500,000</b>	<b>643.275.558,000</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000,000	185.992.000,000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	504.330.000,000	453.572.058,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.511.500,000	3.711.500,000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.647.446.994,000</b>	<b>2.567.812.328,000</b>
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.647.446.994,000	2.567.812.328,000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>948.777.000,000</b>	<b>837.317.305,000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	443.057.000,000	372.646.341,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	401.000.000,000	361.149.364,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104.720.000,000	103.521.600,000
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>11.032.938.311,000</b>	<b>9.089.711.388,000</b>
	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.981.051.762,000</b>	<b>6.364.433.990,000</b>
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.313.413.000,000	1.163.090.340,000
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	720.060.000,000	706.015.750,000
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	152.772.000,000	112.964.250,000
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.481.931.762,000	4.122.387.650,000

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	312.875.000,000	259.976.000,000
	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>3.040.808.549,000</b>	<b>2.725.277.398,000</b>
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2.392.746.805,000	2.191.569.362,000
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	648.061.744,000	533.708.036,000
	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>11.078.000,000</b>	<b>0,000</b>
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	11.078.000,000	0,000
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>1.123.228.000,000</b>	<b>1.075.470.970,000</b>
	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.064.655.000,000</b>	<b>1.027.469.970,000</b>
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	699.128.000,000	683.199.600,000
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	365.527.000,000	344.270.370,000
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	58.573.000,000	48.001.000,000
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	58.573.000,000	48.001.000,000
	<b>Jumlah</b>	<b>25.510.228.805,000</b>	<b>21.530.604.570,000</b>

## 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2,364,418,000</b>	<b>2,303,509,756</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2,250,000</b>	<b>1,591,200</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,250,000	1,591,200
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1,682,835,000</b>	<b>1,627,753,226</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,682,835,000	1,627,753,226
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>120,000,000</b>	<b>119,986,742</b>
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120,000,000	119,986,742
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>12,375,000</b>	<b>12,375,000</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12,375,000	12,375,000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>374,576,000</b>	<b>373,456,998</b>
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	374,576,000	373,456,998



No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>172,382,000</b>	<b>168,346,590</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148,787,000	145,514,590
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23,595,000	22,832,000
	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>1,396,582,000</b>	<b>1,383,150,402</b>
	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>61,133,000</b>	<b>57,406,000</b>
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-	-
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	61,133,000	57,406,000
	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>1,182,035,000</b>	<b>1,172,331,102</b>
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	50,000,000	50,000,000
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	85,633,000	81,299,520
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	16,636,000	16,635,182
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	47,613,000	44,822,800
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	888,600,000	888,600,000
	Penyusunan Rencana Kontijensi	50,000,000	49,300,000
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	43,553,000	41,673,600
	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	<b>103,064,000</b>	<b>103,063,300</b>
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	80,475,000	80,475,000
	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>22,589,000</b>	<b>22,588,300</b>
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	<b>50,350,000</b>	<b>50,350,000</b>
		<b>3,761,000,000</b>	<b>3,686,660,158</b>

- c. Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Madiun Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Masalah
1.	Belum optimalnya kapasitas aparaturnya daerah dalam penanggulangan bencana
2.	Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial
3.	Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

No	Masalah
4.	Kurangnya koordinasi antar instansi terkait saat tanggap darurat bencana
5.	Masih terdapatnya potensi bencana di Kota Madiun
6.	Resisten dari pegawai birokrasi yang mungkin tidak ingin mengubah cara kerja mereka
7.	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peran mereka dalam penegakan hukum
8.	Faktor lingkungan seperti deforestasi atau perubahan iklim yang dapat meningkatkan risiko kebakaran

## 6. URUSAN SOSIAL

- a. Capaian kinerja urusan Sosial yang diperoleh oleh Kota Madiun pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	87,148%	100%
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%

- b. Realisasi belanja Sosial di Kota Madiun Tahun 2023 sebesar Rp 26.683.738.259 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.748.477.718</b>	<b>7.978.441.042</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>206.776.700</b>	<b>204.093.000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	124.237.500	123.884.800
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.227.400	20.256.400

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.311.800	59.951.800
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.070.479.302</b>	<b>5.552.600.061</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.937.424.352	5.419.775.511
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	133.054.950	132.824.550
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>128.023.000</b>	<b>126.218.700</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	101.536.000	100.828.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26.487.000	25.390.700
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>325.541.000</b>	<b>325.531.630</b>
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325.541.000	325.531.630
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>284.631.158</b>	<b>267.510.000</b>
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	284.631.158	267.510.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.273.868.763</b>	<b>1.105.329.032</b>
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	875.168.763	721.789.032
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	398.700.000	383.540.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>459.157.795</b>	<b>397.158.619</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	215.702.000	164.485.261
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	152.421.075	148.595.108
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.034.720	84.078.250
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>3.826.778.450</b>	<b>3.621.916.059</b>
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.826.778.450</b>	<b>3.621.916.059</b>
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	679.469.400	657.619.594
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	60.155.800	58.232.180
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	199.425.600	180.453.300
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.887.727.650	2.725.610.985
	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>2.981.665.743</b>	<b>2.759.004.510</b>
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>2.416.019.663</b>	<b>2.240.752.210</b>
	Penyediaan Permakanan	166.548.000	132.251.800
	Penyediaan Sandang	52.967.043	52.744.500
	Penyediaan Alat Bantu	35.457.200	32.014.900
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	42.300.000	41.437.000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10.100.000	10.100.000
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.928.380.420	1.844.636.510

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Pemberian Layanan Kedaruratan	180.267.000	127.567.500
	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>565.646.080</b>	<b>518.252.300</b>
	Pemberian Layanan Kedaruratan	191.360.500	153.249.000
	Penyediaan Permakanan	95.736.800	95.466.000
	Penyediaan Sandang	20.250.900	17.198.400
	Penyediaan Alat Bantu	31.154.500	30.425.100
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	26.051.380	26.001.800
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	69.200.000	67.800.000
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	117.792.000	117.792.000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	14.100.000	10.320.000
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>12.167.195.900</b>	<b>11.598.123.900</b>
	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>4.270.000</b>	<b>2.700.000</b>
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	1.660.000	1.210.000
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	2.410.000	1.390.000
	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	200.000	100.000
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>12.162.925.900</b>	<b>11.595.423.900</b>
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	917.583.200	892.897.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	406.052.550	379.804.150
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	10.811.745.150	10.297.268.550
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	27.545.000	25.454.200
	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>656.991.300</b>	<b>557.893.500</b>
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>78.209.900</b>	<b>25.160.600</b>
	Penyediaan Makanan	39.282.600	9.983.300
	Penyediaan Sandang	15.177.300	15.177.300
	Pelayanan Dukungan Psikososial	23.750.000	-
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>578.781.400</b>	<b>532.732.900</b>
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	135.615.200	120.459.200
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	443.166.200	412.273.700
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>182.250.086</b>	<b>168.359.248</b>
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>182.250.086</b>	<b>168.359.248</b>
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	182.250.086	168.359.248
		<b>28.563.359.197</b>	<b>26.683.738.259</b>

c. Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Kota Madiun Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) pengumpulan data dilakukan berdasarkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya (proyeksi jumlah klien) dikarenakan tidak bisa merinci secara pasti kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan

Pengemis dan Korban Bencana karena sifatnya insidental ketika terjadi kasus;

- 2) perhitungan kebutuhan dilakukan berdasarkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya (proyeksi jumlah klien) dikarenakan tidak bisa merinci secara pasti kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis dan Korban Bencana karena sifatnya insidental ketika terjadi kasus;
- 3) perencanaan dan penganggaran dilakukan berdasarkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya (proyeksi jumlah klien) dikarenakan tidak bisa merinci secara pasti kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis dan Korban Bencana karena sifatnya insidental ketika terjadi kasus; dan
- 4) Sumber Daya Manusia yang jumlahnya terbatas sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

## **D. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA**

### **1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Kota Madiun berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja **3,2179** dan status kinerja **Sedang**.

### **2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 1.A/LHP/XVIII.SBY/03/2023 Kota Madiun berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2022, yang berarti pengelolaan keuangan di Kota Madiun dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

**E. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN****DAERAH**

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun (Audited/Unaudited) Tahun 2023 Realisasi Pendapatan Kota Madiun Tahun 2023 mencapai sebesar Rp 1.117.609.570.233,47 dan Realisasi Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2023 mencapai Rp 1.194.902.395.527,39 Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023 bersarakan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut:

**1. Berdasarkan Pendapatan**

<b>Kode Rekening</b>	<b>Jenis Pendapatan</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Realisasi (%)</b>
<b>4</b>	Pendapatan	<b>1.088.817.109.508,00</b>	<b>1.117.609.570.233,47</b>	<b>102,64%</b>
<b>4.1</b>	Pendapatan Asli Daerah	261.815.342.908,00	255.560.530.258,67	97,61%
<b>4.1.01</b>	Pajak Daerah	104.240.450.000,00	113.514.116.369,67	108,9%
4.1.02	Retribusi Daerah	18.446.515.665,00	22.551.072.553,00	122,25%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	16.160.694.027,00	14.983.008.032,73	92,71%
4.1.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	122.967.683.216,00	104.512.333.303,27	84,99%
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>827.001.766.600,00</b>	<b>862.049.039.974,80</b>	<b>104,24%</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>730.719.376.000,00</b>	<b>740.776.955.162,80</b>	<b>99,80%</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>667.418.485.000,00</b>	<b>666.062.033.162,80</b>	<b>99,80%</b>
4.2.01.01.01.0001	Dana Bagi Hasil Pajak	24.092.136.000,00	24.083.539.150,00	99,96%
4.2.01.01.01.0003	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	32.071.352.000,00	36.475.210.342,00	113,73%



4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	487.288.274.000,00	487.141.770.396,00	99,97%
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Khusus	94.358.814.000,00	82.402.483.839,80	87,33%
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus Fisik	6.400.881.000,00	5.699.869.054,00	
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	87.957.933.000,00	76.702.614.785,80	
4.2.01.01.01.0004	Dana Bagi Hasil Cukai	29.607.909.000,00	35.959.029.435,00	121,45%
<b>4.2.01.02</b>	<b>Transfer Pemerintahan Pusat Lainnya</b>	<b>63.300.891.000,00</b>	<b>74.714.922.000,00</b>	<b>118,03%</b>
4.2.01.02.01	Dana Penyesuaian	63.300.891.000,00	74.714.922.000,00	118,03%
<b>4.2.02</b>	<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>96.282.390.600,00</b>	<b>121.272.084.812,00</b>	<b>125,95%</b>
4.2.02.01	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	95.663.488.000,00	120.565.582.200,00	126,03%
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	618.902.600,00	706.502.612,00	114,15%

## 2. Berdasarkan Belanja

Kode Rekening	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.280.060.781.955,00</b>	<b>1.194.902.395.527,39</b>	<b>93,35%</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.053.170.646.108,00</b>	<b>975.873.375.042,70</b>	<b>92,66%</b>
<b>5.1.01</b>	Belanja Pegawai	468.936.215.253,00	423.896.152.844,39	90,40%
<b>5.1.02</b>	Belanja Barang dan Jasa	513.171.846.360,00	487.717.322.693,31	95,04%

<b>5.1.03</b>	Belanja Bunga	-	-	
<b>5.1.04</b>	Belanja Subsidi	99.146.000,00	99.146.000,00	100,00%
<b>5.1.05</b>	Belanja Hibah	38.190.636.795,00	32.355.896.005,00	84,72%
<b>5.1.06</b>	Belanja Bantuan Sosial	32.772.801.700,00	31.804.857.500,00	97,05%
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>222.872.275.205,00</b>	<b>217.790.302.662,69</b>	<b>97,72%</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	73.145.003.249,00	71.585.868.051,04	97,87%
5.2.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	83.254.511.750,00	80.940.539.683,65	97,22%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	64.036.113.165,00	62.832.477.443,00	98,12%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.436.647.041,00	2.431.417.485,00	99,79%
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>4.017.860.642,00</b>	<b>1.238.717.822,00</b>	<b>30,83%</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	4.017.860.642,00	1.238.717.822,00	30,83%
	<b>Surplus/ Defisit</b>	<b>(191.243.672.447,00)</b>	<b>(77.292.825.293,92)</b>	<b>40,42%</b>
<b>6</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>295.936.667.818,00</b>	<b>191.244.870.447,43</b>	<b>64,62%</b>
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>295.936.667.818,00</b>	<b>191.244.870.447,43</b>	<b>64,62%</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	295.936.667.818,00	191.243.672.447,43	64,62%
	Pencairan Dana Cadangan		-	
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah		-	

	Yang Dipisahkan			
	Penerimaan Pinjaman Daerah			-
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			1.198.000,00
	<b>SILPA Tahun Berkekaan</b>			<b>113.952.045.153,51</b>

## F. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Database inovasi Daerah Tahun 2023, Kota Madiun memiliki inovasi daerah sebagai berikut :

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Belanja Pengadaan Barang Dengan Kartu Kredit <b>(BANKER)</b>	Sebagai upaya untuk mendukung penggunaan produk produk dalam negeri, terutama produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Belanja pemerintah melalui barang dan jasa di prioritaskan untuk pembelian produk dalam negeri. peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) merupakan system atau bagian aksi afirmasi belanja pemerintah dalam semangat Gerakan Nasional Bangga Bantuan Indonesia (Gernas BBI) yang di canangkan dalam bentuk implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2022 terkait penggunaan transaksi non tunai untuk belanja barang dan jasa Pemerintah Pusat dan Daerah. Selanjutnya BKAD menindak lanjuti permendagri Nomor 79 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan KKPD dalam rangka pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah dengan menyusun regulasi dan persyaratan dan

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			perjanjian kerjasama (PKS). Secara teknis KKPD ini akan menjadi sumber dana bagi satuan kerja saat melakukan belanja barang dan jasa modal aplikasi mobile banking maupun kartu kredit.
2.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah <b>(LK SIPKD)</b>	Peningkatan proses laporan keuangan daerah dengan tujuan: 1. Melaksanakan uji coba data SIPKD 2. Mewujudkan kualitas pelayanan penerbitan LKPD 3. Mewujudkan SIPKD berbasis akruek 4. Mempercepat proses LPKD 5. Menghasilkan data laporan keuangan yang akurat dan terpercaya
3.	Badan Pendapatan Daerah	METODE PEMBAYARAN QRIS	Pajak Hotel, Resto, Parkir, Hiburan, Air Tanah, Reklame, Genset, PBB, BPHTB
4.	Badan Pendapatan Daerah	MODUL PENDAFTARAN	Pajak Hotel, Resto, Parkir, Hiburan, Air Tanah, Reklame, Genset, BPHTB
5.	Badan Pendapatan Daerah	MODUL OBJEK PAJAK TUTUP	Pajak Hotel, Resto, Parkir, Hiburan, Air Tanah, Reklame, Genset, BPHTB
6.	Badan Pendapatan Daerah	MODUL DASHBOARD REALISASI	Laman untuk mengecek Realisasi secara Realtime di semua Objek Pajak dan dapat di akses seluruh pegawai bapenda
7.	Badan Pendapatan Daerah	OPTIMALISASI APLIKASI SIMPADAMA	Optimalisasi dan Upgrade Kebutuhan Menu SIMPADAMA sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu UU No 1 Tahun 2023
8.	Badan Pendapatan Daerah	PELAYANAN PBB SECARA ONLINE	Pengajuan Pelayanan secara Online

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
9.	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Sistem Aplikasi E-KAK	Yaitu sistem aplikasi kinerja yang digunakan dalam hal perencanaan dan penganggaran, yang dimulai dengan penyusunan pohon kinerja. Aplikasi ini digunakan oleh seluruh ASN Kota Madiun dan terintegrasi dengan Sasaran Kinerja Pegawai serta Pemberian Remunerasi. Aplikasi ini digunakan dalam mendukung proses evaluasi SAKIP Tahun 2023.
10.	Bagian Hukum	<b>“BAHUKU UNTUKMU”</b> (Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Kota Madiun)	Bentuk kegiatan berupa Jasa Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin, khususnya penduduk Kota Madiun.
11.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan	Sistem Aplikasi SIMANDOR	Pengembangan sistem aplikasi SIMANDOR yang digunakan sebagai pencatatan data paket pengadaan secara tender maupun pengadaan langsung. Data paket pengadaan berupa nama paket, jadwal pelaksanaan pengadaan, nilai HPS, nilai kontrak, nama pokja pemilihan (tender), nama pejabat pengadaan (pengadaan langsung), nama pemenang (penyedia), alamat pemenang. Selain itu juga terdapat fasilitas penilaian kinerja penyedia sesuai dengan amanat perundangan dan MCP KPK. Dengan aplikasi ini memudahkan penyajian data dan pelaporan.
12.	Bagian Umum	SI-CAKEP (Sistem Informasi Kegiatan Pak Wali)	Inovasi Pelayanan Publik SI-CAKEP (Sistem Informasi Kegiatan Pak Wali) merupakan sebuah inovasi berupa informasi kegiatan pimpinan dalam

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			sebuah sistem informasi berbasis <i>website</i> . Inovasi tersebut berhubungan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pengaturan jadwal kegiatan bersama pimpinan daerah. Sistem Informasi tersebut dapat diakses oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui <i>website</i> dengan tujuan untuk mempermudah, mempercepat dan simplifikasi layanan. Sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi lebih mudah dalam menentukan jadwal kegiatan bersama pimpinan. Dengan adanya inovasi tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kota Madiun.
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	LAYANAN 3 IN 1	Pelayanan kepengurusan dokumen dengan membawa persyaratan lengkap, maka akan mendapatkan 3 dokumen kependudukan (KK, Akta Kelahiran, dan KIA).
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	GADJAH MADA	Petugas Adminduk Berkunjung ke Rumah, Masyarakat Kota Madiun Bahagia. Layanan perekaman KTP-EL ke rumah-rumah bagi penduduk rentan yang belum rekam KTP-el dan mempunyai kendala/halangan tetap, misalnya penduduk usia lanjut atau sakit sehingga tidak bisa bepergian keluar rumah.
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	TAKSIAH	Antar Akta Kematian Seraya Memuliakan Jenasah. Layanan antar dokumen kependudukan sampai ke tempat tinggal penduduk. Hal ini



No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			khususnya untuk pengurusan akta kematian.
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BHAKTIKU EYANGKU	Bawakan Akte Kelahiran Untukmu Eyangku. Pelayanan ini khusus pelayanan akte kematian yang sudah terlambat, kepengurusan akte kelahiran ini bisa lewat pertemuan lansia di Kelurahan yang dikoordinir oleh pengurus lansia dokumennya dan diserahkan di Kantor Dukcapil untuk dicetak akte kelahirannya.
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	WATERMELON	WA Center Melayani Selalu On. Pelayanan ini secara terpadu melalui Whatsapp (WA) pelayanan Pemerintah Kota Madiun lewat nomor 08113577800.
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PECEL ANDOK BU TUMI	Pelayanan Cepat keliling Administrasi Kependudukan Buka Sabtu Minggu. Pelayanan ini merupakan pelayanan semua dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang pelaksanaannya di fasilitas umum/Kelurahan/Lapak di hari Sabtu dan Minggu.
19.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	ANTI PREI	Antar dan Datangi Pemohon Adminduk secara Gratis Setiap Hari Awan Bengi. Dimana selama 7 (Tujuh) hari baik Hari Sabtu dan Minggu maupun hari Libur.
20.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BROKOHAN	Bayi Lahir Otomatis Entuk Dokumen Kependudukan dan Jaminan Kesehatan. Dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan bidan-bidan dan rumah sakit untuk segera melaporkan peristiwa bayi yang baru lahir melalui BROKOHAN untuk mendapatkan NIK

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			di KK, Akte Kelahiran dan KIA.
21.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	"KAWAN DISKA" Dinas Kesehatan PPKB	Inovasi "KAWAN DISKA" yang memiliki akronim KAWAN DINAS KESEHATAN merupakan salah satu upaya dalam rangka penyebarluasan informasi kesehatan ataupun informasi pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Madiun pada masa Pandemi yang dikemas dalam bentuk video menarik berupa video animasi, video sederhana, podcast, poster serta repost infokes dari Platform Kesehatan lainnya.
22.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	"WSS (Warung Stop Stunting)" Dinkes PPKB	Inovasi Warung Stop Stunting bertujuan menurunkan angka stunting di Kota Madiun dengan sasaran ibu hamil dan balita stunting dengan menyediakan makanan tambahan dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji. Kegiatan dilakukan seminggu sekali di lapak UMKM setiap kelurahan selama 9 minggu berupa : pengambilan bahan mentah, makan bersama, pemberian voucher belanja, pembinaan dari PKK Kelurahan.
23.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	"TERANG BULAN MAS BARJO" Puskesmas Banjarejo	TERANG BULAN MAS BARJO ( TEman RiANG iBU saat kehamiLAN di puskesMAS BANjaReJO. Inovasi mengenai edukasi Kesehatan terbaru pada ibu hamil melalui Leaflet dan video animasi di sosial media, berkaitan dengan tanda dan bahaya saat

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			kehamilan serta pencegahan agar ibu hamil terhindar dari penyulit kehamilan. Tujuan inovasi ini adalah mencegah dan meminimalisir terjadinya komplikasi hingga kematian pada ibu hamil dan bayi baru lahir.
24.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	"KENALI WATAK MAS BARJO" Puskesmas Banjarejo	KENALI WATAK MAS BARJO (KENALI kegaWATAan anaK balita di puskesMAS BANjaReJO) bertujuan untuk menjadi sarana informasi dan edukasi kepada orang tua maupun pengasuh agar dapat melakukan perawatan balita sakit di rumah dan mengetahui apa saja tanda kegawatannya sehingga tidak terlambat untuk di bawa ke fasilitas kesehatan.
25.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	"KARAMEL GULA" Puskesmas Banjarejo	(KenAli CaRA MeMELihara Kesehatan Gigi dan MULut Anak Balita). Inovasi yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada ibu balita untuk meningkatkan kesadaran dalam mendampingi dan membiasakan anak memelihara kesehatan gigi dan mulutnya. Harapannya dapat menjadi sarana tambahan informasi kesehatan bagi ibu balita mengenai cara merawat kesehatan gigi dan mulut anak balita sejak dini, serta meningkatnya pengetahuan ibu balita tentang cara menjaga kesehatan gigi dan mulut anak balita.

<b>No.</b>	<b>Pelaksana Inovasi Daerah</b>	<b>Inovasi Daerah</b>	<b>Keterangan</b>
26.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	"PITA SIKUMBANG DUREN" Puskesmas Demangan	PITA SI KUMBANG DUREN (PIJAT BADUTA STIMULASI UNTUK TUMBUH KEMBANG TIDUR NYENYAK). Merupakan pelayanan pijat bayi dibawah dua tahun, guna menstimulasi untuk tumbuh kembang, dan tidur nyenyak. Bertempat di Pustu Josenan, pelayanan Pita Si Kumbang Duren dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih yang terampil dan berpengalaman
27.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	"PAPEDA ODGJ" Puskesmas Demangan	PAPEDA ODGJ "Paguyuban Peduli pada Orang dengan Gangguan Jiwa". Merupakan wadah masyarakat yang peduli terhadap orang dengan gangguan jiwa yang melibatkan petugas kesehatan puskesmas, kader kesehatan jiwa dan lintas sektor yang berperan.
28.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	"PINOKIA" Puskesmas Manguharjo	PINOKIA (Pojok INformasi Obat Khusus lansIA). Untuk mengoptimalisasi pelayanan informasi obat bagi pasien lansia serta meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga pasien terkait informasi obat khususnya pada lansia.
29.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	"LINTANG NDARU" Puskesmas Tawangrejo	LINTANG NDARU (LAYANAN POLI PETANG DAN GAWAT DARURAT). Inovasi dilatar belakangi kepatuhan pasien dengan penyakit degeneratif (hipertensi dan diabetes mellitus) control ke puskesmas pada saat jam pelayanan. Oleh karena itu mengakomodir

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			masyarakat akan control rutin dan Layanan Gawat Darurat maka Puskesmas Tawangrejo memiliki inovasi LINTANG NDARU (Layanan poli petang dan gawat darurat). Pelayanan poli petang mulai jam 16.00 sampai jam 20.00. Layanan Gawat darurat mulai 07.00 sampai jam 20.00
30.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	"GESIT" Puskesmas Tawangrejo	GESIT MASTARJO (GERAKAN SADAR IMUNISASI PUSKESMAS TAWANGREJO). Kegiatan pelayanan imunisasi yaitu adanya Gerakan sadar imunisasi di puskesmas twangrejo melalui group WhatsApp yang terdiri bidan wilayah, ibu bayi dan balita, kader kesehatan, promkes wilayah dan dokter.
31.	Dinas Komunikasi dan Informatika	MANEKIN (Manajemen Kinerja) Kota Madiun	Merupakan aplikasi integrasi dari berbagaimacam aplikasi yang digunakan pada Pemerintah Kota Madiun baik pelayanan maupun administrasi pemerintahan, seperti awak sigap, e-kinerja, e-surat, skp, open data, dsb
32.	Dinas Komunikasi dan Informatika	MBANGUN SWARGA (Madiun Membangun, Sejahtera Bersama Warga)	Sebuah aplikasi untuk penanganan sosial kemasyarakatan dimana aplikasi tersebut bertujuan mendapatkan data keseluruhan secara terintegrasi, tanpa mengganggu operasional aplikasi yang berjalan di PD pelayanan
33.	Dinas Lingkungan Hidup	Aplikasi SILAPLING	Aplikasi untuk melaporkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara daring

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
34.	Dinas Lingkungan Hidup	Aplikasi SITEBAS	Sistem Informasi Terpadu Bank Sampah
35.	Dinas Lingkungan Hidup	Si Mbok Ayu	Melukis dinding kota agar tambah cantik dan menarik
36.	Dinas Lingkungan Hidup	Dapur Umum	Dapur umum gratis yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dalam pemanfaatan gas methan sebagai alternatif gas elpiji
37.	Dinas Lingkungan Hidup	Workshop TPA	Workshop di TPA winongo dibangun untuk sarana pelatihan pemanfaatan limbah sampah (3R)
38.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<b>PARTNER MATARAM</b> (Pahlawan Street Center Madiun Kota Ramah dan Nyaman)	
39.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	INOVASI SIAP KAKA (Inovasi Sistem Pendampingan Pelayanan Perizinan Keliling Ke Kelurahan) di Kota Madiun	Inovasi SIAP KAKA (Sistem Pendampingan Pelayanan Perizinan Keliling Ke Kelurahan) adalah inovasi pelayanan publik yang melakukan kegiatan pendampingan pengurusan izin usaha bagi pelaku usaha dengan menggunakan sistem OSS RBA dengan ketentuan persyaratan yang harus dicukupi oleh pemohon, yaitu wajib memiliki NIK, HP Android dengan nomor aktif, email aktif, dan wa aktif serta NPWP bagi pelaku usaha yang memiliki PT/CV, serta output berupa : NIB (Nomor Induk Berusaha) yang langsung bisa dicetak dan dibawa oleh pemohon atau dapat dicetak secara



No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			mandiri oleh pemohon. Inovasi SIAP KAKA dimulai bulan Pebruari Tahun 2022 dengan sasaran pelaku usaha yang belum memiliki NIB dan berdomisili diwilayah 27 Kelurahan di Kota Madiun.
40.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	INOVASI MASS (Madiun Kota Single Submission)	Madiun Kota Single Submission (MASS) adalah salah satu inovasi yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun @dpmptsp.kotamadiun yang merupakan aplikasi yang dipergunakan untuk melakukan permohonan dan penerbitan berbagai perizinan, terutama perizinan non berusaha dan pemenuhan kewajiban berusaha.
41.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	INOVASI SAPA LKPM (Siap Pandu Permasalahan LKPM)	SAPA LKPM (Siap Pandu Permasalahan LKPM) adalah inovasi dalam pelaporan LKPM. SAPA LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) merupakan media komunikasi antara pemerintah dengan pelaku usaha atas kegiatan yang dilakukan berdasarkan sektor usaha dan lokasi usaha. Setiap pelaku usaha diwajibkan atas pelaporan LKPM ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. LKPM dilaporkan setiap 3 bulan untuk pelaku usaha NON UMK dengan nilai investasi 5 M keatas dan untuk UMK setiap 1 semester dengan nilai investasi dibawah 5 M. Diharapkan dengan adanya inovasi SAPA LKPM pelaku usaha bisa rutin untuk melaporkan

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			LKPMnya.
42.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	INOVASI PETI EMAS (Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Madiun)	PETI EMAS merupakan inovasi sebuah Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Madiun, yang bertujuan untuk memberikan informasi potensi dan peluang investasi guna menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kota Madiun. Dalam PETI EMAS telah dilengkapi data dan informasi mengenai lokasi potensi dan peluang investasi yang strategis dan bernilai ekonomis bagi para investor untuk mengembangkan usahanya. Melalui PETI EMAS ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan menjadi daya Tarik untuk berinvestasi bagi para investor maupun calon investor.
43.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	HALLO PERIZINAN	Media informasi tentang perizinan berusaha dan non berusaha melalui dialog interaktif secara on air di Suara Madiun dan hasilnya dapat diikuti ulang di media sosial (youtube dan facebook) milik Pemerintah Kota Madiun, setiap Rabu Minggu kedua dan keempat jam 15.00-16.00 WIB
44.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	LAURA JOSS (LAPAK UMK KELURAHAN JEMPUT OSS)	Inovasi pelayanan bergerak dan berbantuan (pelayanan jemput bola) bagi pelaku usaha di lapak-lapak kelurahan Kota Madiun
45.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu	PETA SEBARAN PERIZINAN	Inovasi dalam rangka keterbukaan informasi publik untuk mempermudah pelacakan izin dan sarana informasi lainnya dengan peta digital yang dapat diakses pada web

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
	Pintu		perizinan.madiunkota.go.id/webgis/
46.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PERI NAGA MASS	Inovasi pencabutan izin tenaga Kesehatan melalui MASS yang semula diajukan pemohon secara manual, beralih melalui aplikasi MASS sehingga proses pelayanan lebih terukur, pasti dan dapat dilacak
47.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	HELPDESK GASSPOL	Helpdesk Siaga Sigap Pendampingan Perizinan Secara Online, yang menampung konsultasi segala permasalahan/kendala terkait dengan perizinan melalui nomor WA 082244140102
48.	Dinas Pendidikan	WISUDA SITI DIMANJA (Wisata Edukasi Outdoor Learning Berbasis Teknologi Informasi Lejitkan Kemampuan Discovery, Kemandirian dan Kerjasama)	Menumbuhkan kemampuan discovery (menemukan konsep/pengetahuan baru) dengan memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan sekitar yang tidak tersedia di dalam menumbuhkan sikap kemandirian (dapat meregulasi diri sendiri), serta meningkatkan sikap kerjasama (mampu berkolaborasi efektif untuk mencapai tujuan)
49.	Dinas Perdagangan	SIM PASAR (Sistem Informasi Pasar)	Merupakan Inovasi Pelayanan Publik dalam hal pengelolaan administrasi di pasar baik penerima retribusi maupun database pedagang. Pengendalian dengan E-retribusi ini memiliki peranan preventive/pencegahan terhadap tunggakan retribusi, Disisi lain juga mendukung SPBE dimana proses didalamnya tidak lagi menggunakan pembayaran cash melainkan cashless sehingga tidak ada lagi petugas

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			membawa uang cash, akuntabilitas juga terjaga serta mengeliminasi kemungkinan fraud atau resiko pelanggaran. Pedagang Juga Memiliki akses mengenai informasi terkait penyewaan tempat serta data administratif lainnya, kerjasama ini melibatkan pihak Bank Jatim dimana akan terhubung langsung dengan rekening kas daerah Pemerintah Kota Madiun
50.	Dinas Perdagangan	"WARTEK Inflasi Kota Madiun ( Warung Tekan Inflasi )"	Merupakan inovasi pelayanan publik terkait dengan pengendalian inflasi, Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Perdagangan menyelenggarakan program penyaluran belanja subsidi. Tujuan dari inovasi ini untuk menstabilkan harga sehingga dapat membantu masyarakat membeli barang kebutuhan pokok dengan mudah dan murah. Pelaksanaan program ini di Wartek ( Warung Tekan Inflasi ) yang tersedia sewilayah Kota Madiun. Inovasi ini di kolaborasikan dengan web sistem yang didesain oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, dengan nama "Sistem Informasi Operasi Pasar Kota Madiun (SI OPA OMA)", yang tujuannya untuk merekam transaksi penjualan komoditas yang disubsidi untuk membatasi pembelian dalam jangka waktu tertentu.
51.	Dinas Perhubungan	Aplikasi Tracking Bus	Aplikasi untuk memantau posisi bus sekolah gratis secara update yang digunakan oleh wali murid dalam

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			rangka memantau secara update anaknya yang naik bus sekolah gratis
52.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	“MAS DARING PJU” SMART SISTEM PENGENDALIAN DAN MONITORING PJU	Inovasi Smart Sistem Pengendalian dan Monitoring Penerangan Jalan Umum merupakan pemanfaatan lanjutan atas teknologi Wifi yang telah ditemukan dan diaplikasikan secara luas dalam berbagai aspek terutama dalam hal transfer data. Transfer data ini akan diterjemahkan secara smart (lebih pintar) pada beberapa peralatan yang akhirnya dapat memberikan manfaat berupa kontrol dan monitor atas sejumlah panel penerangan jalan umum yang tersebar di seluruh Kota Madiun
53.		PENERAPAN PENYIRAMAN TANAMAN KOTA SECARA OTOMATIS DENGAN METODE INTERNET OF THING (IOT) UNTUK MENURUNKAN TINGKAT KEMATIAN TANAMAN PADA RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MADIUN	Penerapan Penyiraman Tanaman Kota Secara Otomatis Dengan Metode Internet Of Thing (Iot) Untuk Menurunkan Tingkat Kematian Tanaman Pada Ruang Terbuka Hijau Di Kota Madiun merupakan pengembangan teknologi
54.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberian Bantuan Sosial kepada Penyandang Disabilitas	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Sosial Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kepada Pemerlu Pelayanan

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			Kesejahteraan Sosial Pedoman dalam pelaksanaan Bantuan Sosial PPKS untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Madiun
55.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Si Caker	Si Caker atau Sistem Informasi Pencari Kerja merupakan sebuah media berbentuk aplikasi dan website yang berfungsi untuk memberikan informasi ketenagakerjaan kepada masyarakat sebagai pencari kerja dan memfasilitasi perusahaan sebagai pemberi kerja dalam memberikan pemasangan iklan lowongan kerja. Dengan Si Caker, masyarakat dapat langsung mendaftar dan memasukkan lamaran kerja, sehingga proses pencarian kerja dapat lebih mudah, efektif dan efisien. Si Caker ditetapkan sebagai inovasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun sejak 2 Februari 2021 sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun Nomor : 560/053/401.108/2021 Tentang Penetapan Inovasi Si Caker (Sistem Informasi Pencari Kerja) pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun
56.	Kecamatan Kartoharjo	Aplikasi E- Surprise	Aplikasi E – SURPRAIS merupakan aplikasi yang digunakan untuk mempermudah Kecamatan dalam mengoreksi surat pernyataan ahli waris yang sudah diajukan oleh Masyarakat ke Kelurahan.

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
57.	Kecamatan Manguharjo	E-P2L	Bagi internal Pemerintah Kota Madiun dalam hal ini Kecamatan Manguharjo Kota Madiun yakni kontrol dan identifikasi atas kegiatan dan distribusi hasil panen P2L se-wilayah Kecamatan Manguharjo.
58.	Kecamatan Taman	SINOMAN	SINOMAN adalah layanan online berbasis google form dan terhubung dengan WA Pelayanan Kecamatan Taman untuk mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh Kecamatan Taman yang mulai diimplementasikan tahun 2021 dan. Layanan ini dapat diakses oleh masyarakat umum. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan tanpa datang ke Kantor Kecamatan Taman. Masyarakat dapat mengisi aplikasi mengenai layanan apa yang diinginkan, kemudian petugas pelayanan akan merespon dan menindaklanjuti sesuai dengan layanan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Selain itu, data yang telah dimasukkan oleh masyarakat dapat tersimpan di database Kecamatan Taman sehingga dapat mempermudah dalam penyusunan laporan.
59.	Kecamatan Taman	APELMOJO (2022)	Aplikasi Pengantar RT online berbasis Pemrograman PHP, database MySQL
60.	Kecamatan Taman	INVENTORYMOJO (2023)	Aplikasi Inventory berbasis Pemrograman PHP, database MySQL
61.	Satuan Polisi Pamong Praja	LIK PAKAR (Layanan Edukasi	Merupakan nama aplikasi mobile dengan menggunakan nama



No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
	dan Pemadam Kebakaran	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran)	kearifan local sebagai sarana untuk memangkas atau meyederhanakan dan mempercepat prosedur pelayanan penanggulangan kebakaran sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan informasi, pelaporan kejadian kebakaran secara cepat (menggunakan panic button), edukasi, pelatihan pencegahan dan penanganan kebakaran dan inspeksi alat pemadam kebakaran secara efektif dan efisien untuk menyusun aplikasi, maka perlu penetapan Penggunaan Aplikasi LIK PAKAR
62.	Sekeratariat DPRD	Aplikasi E-AR (Aspirasi Rakyat) dan Aplikasi E-Inisiatif	E-AR (Aspirasi Rakyat) merupakan aplikasi untuk menghimpun partisipasi masyarakat melalui penyampaian aspirasi secara online untuk mendukung fungsi Pengawasan DPRD terhadap pembangunan dan kebijakan daerah di Kota Madiun. E-Inisiatif merupakan partisipasi masyarakat melalui penyampaian aspirasi secara online berupa masukan terhadap raperda inisiatif DPRD yang sedang disusun oleh DPRD Kota Madiun.
63.	Sekretariat DPRD	RISA CETAR (e-Risalah Rapat tercatat Rapi)	RISA CETAR (e-Risalah Rapat tercatat Rapi) merupakan sebuah inovasi penggunaan aplikasi melalui media website erisalah.madiunkota.go.id dimana bertujuan untuk menghimpun segala bentuk catatan

---

<b>No.</b>	<b>Pelaksana Inovasi Daerah</b>	<b>Inovasi Daerah</b>	<b>Keterangan</b>
			rapat paripurna maupun notulen rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Madiun.

---

## ***PENUTUP***

Demikian Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Madiun terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan Tahun Anggaran 2023 dengan tingkat capaiannya. Guna menyempurnakan dan memperbaiki pelaporan pencapaian kinerja, Pemerintah Kota Madiun sangat mengharapkan adanya peningkatan kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas dalam bentuk :

1. Partisipasi stakeholder, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi pemerintah pusat di daerah, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat, untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat sehingga dalam pengambilan kebijakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Daerah ;
2. Koordinasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Madiun maupun Pemerintah Provinsi dan Pusat serta penyelarasan dengan Program Pemerintah Kota Madiun dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan sebagai bahan perumusan Kebijakan Pemerintah Kota Madiun yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan Kota Madiun di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi untuk Mewujudkan Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera.

---

Segala saran, kritik dan masukan tentang Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Walikota Madiun Periode Tahun 2023 dari masyarakat diberikan waktu selama 30 hari dan dapat disampaikan ke Pemerintah Kota Madiun melalui :

1. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Madiun, Jalan Pahlawan No.37 Madiun
2. Email : [bagpem.kotamadiun@gmail.com](mailto:bagpem.kotamadiun@gmail.com)